

**Jumat, 14 Januari 2005**  
**UNTUK DIBERITAKAN SEGERA**

## **SIARAN PERS**

### **Keterangan Pers Koordinator Khusus PBB Sekembalinya dari Aceh**

#### **Informasi Terakhir Kegiatan Kemanusiaan di Indonesia:**

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Tahap kedaruratan terpenting dari upaya menanggulangi bencana di Indonesia berjalan baik dan mekanisme yang diperlukan untuk membantu masyarakat setempat terus ditingkatkan, demikian Margaret Wahlstrom, Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Usaha Penanggulangan Tsunami, dalam pertemuan dengan wartawan di Pusat Media PBB pagi ini.

Wahlstrom berada di Jakarta selepas kunjungannya ke Aceh, di mana ia mendiskusikan berbagai permasalahan dengan para pejabat pemerintah dan unit koordinasi PBB.

Ia menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana lebih mempercepat kerjasama antara berbagai pihak, terutama pihak-pihak di dalam sistem PBB dan pemerintah Indonesia. Ditekankan bahwa keberadaan PBB adalah untuk mengkoordinasikan bantuan internasional dengan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dengan pemerintah Indonesia berjalan positif dan menghasilkan upaya segera memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia.

Hal penting lainnya adalah penyelesaian dan penyusunan kajian yang dilakukan badan-badan PBB, pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kajian mengenai kondisi kesehatan di seluruh wilayah Pantai Barat telah selesai dilaksanakan. Sedangkan, pemetaan daerah pengungsi yang penting bagi penyusunan rencana pemerintah dalam menempatkan tenaga sukarelawan, sedang berlangsung.

Masalah utama lain yang muncul dalam pembicaraan dengan pihak pemerintah adalah bagaimana keberadaan pekerja kemanusiaan internasional—termasuk di antaranya ratusan orang dari non-organisasi pemerintah—dapat dimanfaatkan secara produktif. Jika tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. Wahlstrom menilai kekhawatiran pemerintah mengenai masalah keamanan dan perlunya organisasi-organisasi non-pemerintah mendaftarkan diri sebagai hal yang positif. Demi kebaikan semua pihak, identitas, keberadaan serta tujuan setiap orang perlu tercatat dengan baik.

Berkaitan dengan masalah keamanan secara umum, ia menjelaskan bahwa PBB sudah terbiasa beroperasi di daerah konflik dan memiliki standar pengaturan keamanan seraya terus menjalin kerjasama erat dengan pemerintah. Selama ini belum ada laporan mengenai

hambatan dalam pemberian bantuan akibat konflik di Aceh, baik dari pihak pemerintah maupun GAM. Apabila masalah tersebut muncul, akan diambil langkah-langkah selanjutnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Walhstrom menyatakan bahwa keberadaan PBB kemungkinan akan dikurangi seiring dengan beralihnya fokus bantuan ke arah rekonstruksi dan meningkatnya kemampuan pemerintah di Aceh. Menjawab pemberitaan mengenai PBB meminta bayaran sebesar USD 350 juta untuk mengelola bantuan internasional, ia menegaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar. Hanya sejumlah kecil dari dana sebesar USD 400 juta yang dijanjikan untuk membantu Indonesia digunakan untuk biaya administrasi. PBB tidak mengambil keuntungan sama sekali.

Berkenaan dengan masalah penyakit infeksi, ia mengatakan bahwa pemantauan yang dilakukan secara komprehensif memperlihatkan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Penyuntikan dan upaya melindungi kesehatan masyarakat terus dilakukan. Upaya penempatan pegawai lokal pun terus dilaksanakan, begitu pula dengan perbaikan kehidupan di Banda Aceh. Akhirnya, ia pun mendesak perlunya perhatian media yang seimbang terhadap daerah-daerah terpencil selama masa rekonstruksi berlangsung.

**Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pusat Media di: +62 21 314 0081, +62 21 315 3682, +62 21 314 0066, atau [media.centre@un.or.id](mailto:media.centre@un.or.id)**